

BAB. IV

UPAYA - UPAYA AMERIKA SERIKAT DALAM REALISASI PEMISAHAN SUDAN SELATAN.

Amerika sebagai sebuah negara yang memiliki kekuatan besar dalam politik, ekonomi dan militer dan hal tersebut akhirnya menyebabkan Amerika selalu merasa berhak untuk mencampuri urusan dalam negeri negara lain baik itu dengan alasan untuk menciptakan dunia yang damai atau pun untuk menyebarkan sistem demokrasi yang dianutnya. Akan tetapi dibalik semua itu, Amerika selalu berusaha untuk melakukan campur tangan di negara – negara lain tersebut agar dapat mencapai atau memperoleh kepentingan nasionalnya.

Seringnya upaya intervensi atau campur tangan Amerika dimulai sejak keruntuhan Uni Soviet, dimana setelah keruntuhannya tersebut, Amerika menjadi satu – satunya negara yang kuat. Dengan runtuhnya Uni Soviet yang sebelumnya menjadi ancaman terhadap hegemoni Amerika tersebut, maka tidak ada lagi negara yang dapat menghambat hegemoni serta pengaruhnya yang ingin ditancapkan oleh Amerika di negara – negara lain. Kehadiran Amerika dalam dunia politik internasional memberikan dampak yang sangat besar terhadap tatanan dunia internasional dengan banyaknya negara - negara yang bergantung pada kekuatan politik, ekonomi maupun militer Amerika dari sejak saat itu.

Sejak kemenangannya dalam perang dunia atas Uni Soviet tersebut, Amerika Serikat selalu menerapkan politik intervensionis dan ekspansionis ke negara- negara yang dianggap memiliki posisi strategis terhadap kelangsungan

politik luar negeri serta kepentingan nasional Amerika. Hal tersebut dilakukan oleh Amerika agar negara – negara tersebut mengikuti pengaruh Amerika yang kemudian pada akhirnya akan menjadi koloni – koloni Amerika dengan tetap berada dibawah kekuasaan Amerika itu sendiri. Sepertinya halnya negara Sudan, Amerika telah sejak lama mencoba menancapkan pengaruhnya di negara ini dengan berbagai macam cara intervensi baik itu, intervensi langsung maupun sembunyi – sembunyi dengan cara menjaga agar konflik di negara tersebut terus berlangsung dan nanti pada akhirnya akan membutuhkan bantuan Amerika untuk membantu menyelesaikan konflik tersebut.

Sudan merupakan salah satu negara yang dianggap memiliki posisi strategis untuk kepentingan nasional Amerika baik itu untuk kepentingan minyak ataupun pembendungan penyebaran Islam yang menjadi salah satu ancaman kuat bagi hegemoni Amerika di dunia setelah runtuhnya komunisme. Hal ini disebabkan oleh wilayah Sudan adalah wilayah Islam terluas dan terbesar di Afrika yang menjadi jembatan penyebaran Islam ke wilayah – wilayah di Afrika Selatan yang notabene masih menganut agama Kristen dan Animisme. Dan juga adanya keinginan untuk menguasai minyak di wilayah negara tersebut, dimana wilayah Sudan termasuk wilayah yang kaya akan sumber daya Alam, khususnya minyak yang sangat dibutuhkan oleh Amerika agar industri – industri di negara mereka tetap berjalan.

Berbagai Alasan kepentingan, demokrasi, HAM dan kepedulian terhadap kemanusiaan selalu menjadi dasar bagi Amerika Serikat untuk memulai intervensinya di negara – negara dengan potensi strategis sangat besar bagi

Amerika. Amerika menggunakan berbagai cara intervensi untuk dapat mempengaruhi wilayah – wilayah tersebut agar nantinya negara – negara tersebut berada dibawah pengaruh dan kekuasaan Amerika Serikat.

Sudan adalah negara di Afrika yang juga mengalami apa yang disebut perang saudara, perang berkepanjangan antara pemerintah pusat dan kelompok pemberontak yang menginginkan kemerdekaan atas wilayah yang mereka tinggali. Dalam perang saudara ini pun tidak murni hanya persetujuan antara pemberontak dan pemerintah pusat, tetapi di percaya juga adanya pihak – pihak asing yang ikut memberi andil dalam jalannya konflik berkepanjangan di wilayah tersebut.

Salah satu dari pihak tersebut adalah negara Amerika, konflik yang terjadi hingga sampai pada pemisahan Sudan Selatan sebagai negara baru di dunia tidak terlepas dari politik luar negeri Amerika. Hal ini dipercaya karena adanya cadangan minyak yang besar di wilayah tersebut dan juga keinginan Amerika menjadi negara dengan hegemoni yang kuat tanpa ada hambatan dari hegemoni – hegemoni kelompok atau negara lain, khususnya Islam yang menjadi ancaman besar bagi Amerika saat ini. Dengan melihat posisinya yang strategis untuk mendukung kepentingan Amerika, maka dilakukanlah berbagai macam intervensi untuk membantu agar wilayah Sudan Selatan yang notabene menganut kepercayaan Kristen ataupun Animisme dan berbeda dari wilayah Utara yang mayoritas menganut Islam dapat memerdekakan diri dan pada akhirnya akan mengikuti pengaruh Amerika. Campur tangan atau intervensi Amerika yang dikatakan mengisung demokrasi HAM dan untuk mencintakan kedamaian dan

kesejahteraan bagi masyarakat Sudan ini sebenarnya tidak terlepas dari kepentingan nasional Amerika. Melalui konflik – konflik yang pastinya diikuti dengan berbagai macam pelanggaran HAM dan kemanusiaan yang sering terjadi akibat dari perseteruan pihak – pihak yang terlibat, baik dari pemerintah pusat maupun dari pihak pemberontak yang kemudian digunakan Amerika menjadi alasan berbagai intervensinya untuk memisahkan kedua wilayah negara yang berbeda keyakinan dan kebudayaan tersebut.

A. Isu Pelanggaran HAM dan Terorisme di Sudan.

Sepanjang sejarah konflik yang terjadi di wilayah negara Sudan, berbagai macam bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak – pihak yang bertikai di negara ini, mulai dari banyaknya korban – korban yang kehilangan keluarga, rumah maupun nyawanya sampai pada dijadikan sebagai budak oleh orang – orang kuat di wilayah tersebut. Dimana Amerika kemudian melihat dengan adanya konflik tersebut menyebabkan banyak sekali pelanggaran – pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak – pihak yang bertikai. Dan juga dengan adanya konflik tersebut yang dirasa akan dapat mempengaruhi keamanan regional maupun keamanan internasional. Dimana pemberontakan yang mengancam keamanan di daerah - daerah perbatasan sehingga menyebabkannya menjadi rawan terhadap perdagangan ilegal dan munculnya aktivitas terorisme dan bahkan menyebabkan banyaknya kamp – kamp pengungsian korban dari konflik tersebut ke daerah negara – negara tetangga.

Sebenarnya pelanggaran – pelanggaran HAM dan juga diskriminasi diwilayah Sudan ini telah lama terjadi, mengingat konflik internal negara tersebut sudah terjadi sejak saat masih berada di bawah pengaruh Inggris dan juga mengingat latar belakang terjadinya konflik ini pun dikarenakan adanya ketidakpuasan wilayah selatan atas kebijakan – kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat di wilayah utara yang kebanyakan dipegang oleh masyarakat utara yang notabenenya adalah masyarakat muslim negara tersebut. Sebelumnya saat presiden An-Numaeri menjabat pun Islamisasi menyeluruh di wilayah Sudan sudah terapkan dan bahkan diberlakukannya hukuman yang sama bagi seluruh warganegara tanpa melihat kepercayaan yang dianut oleh warganya, dimana hukuman – hukuman tersebut memungkinkan bentuk-bentuk hukuman badan (hudud), seperti amputasi anggota badan, cambuk, rajam, memenggal kepala, dan penyaliban.⁵¹ Akan tetapi setelah pemerintahan pusat berganti rezim pada tahun 1989 akibat dari kudeta yang dilancarkan oleh Omar Bashir, berbagai macam tuduhan pelanggaran HAM dan isu – isu menyangkut kemanusiaan serta terorisme kemudian merebak dan menyebabkan negara – negara pendonor menghentikan bantuan – bantuannya untuk negara terluas di Afrika ini .

Pada tahun 1989 Amerika Serikat dan negara pendonor lainnya memutuskan untuk menghentikan bantuan pembangunan kepada negara Sudan. Dan kemudian berlanjut dengan penarikan semua personil diplomatik dan juga penutupan kedutaan besarnya oleh Amerika Serikat pada akhir tahun 1991 yang disebabkan oleh perubahan kebijakan pemerintah pusat Sudan yang menerapkan

⁵¹. Sudan. Human Rights Conditions, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6a607f.html%20%5Baccessed%2012%20April%202012%5D>, diakses pada tanggal 18 Maret 2012.

hukum syariah di seluruh wilayah Sudan tidak terkecuali dengan Sudan Selatan yang notabene mempunyai perbedaan kebudayaan dan juga kepercayaan dengan wilayah Utara Sudan. Hal ini bertentangan dengan prinsip – prinsip politik luar negeri Amerika yang menjunjung tinggi masalah penegakkan HAM yang merasa dengan diberlakukannya hukum tersebut secara menyeluruh maka itu berarti memaksakan kehendak mereka kepada masyarakat selatan yang notabene mempunyai hukum dan agama yang berbeda. Dimana kemudian pada tahun – tahun tersebut dan seterusnya banyak sekali terjadi pelanggaran – pelanggaran HAM seperti terdapatnya kasus perbudakan, perdagangan manusia yang dianggap sebagai tawanan perang atau budak dan melakukan kerja paksa, penjualan dan perdagangan anak, indoktrinasi ideologis dengan memaksa anak – anak atau budak – budak yang didapat dari masyarakat di wilayah selatan untuk meninggalkan kepercayaan atau agamanya.

Sejak tahun 1989, sebagian besar dari 1.000 tahanan yang ditangkap oleh pemerintah pusat tidak diberitahu tentang alasan penangkapan mereka dan ditahan tanpa tuduhan resmi selama lebih dari 18 bulan sebelum kemudian dibebaskan. Kemudian dalam bidang politik terdapat beberapa diskriminasi seperti adanya larangan bagi masyarakat non-Muslim di negara tersebut untuk dapat memegang jabatan tinggi di militer, eksekutif atau yudikatif.⁵²

Dan sejak tahun 1992, pemerintah telah sewenang-wenang menahan atau menangkap anak – anak yang berada di jalan saat mereka melakukan razia tanpa mencari tahu terlebih dahulu apakah anak – anak tersebut masih mempunyai

keluarga atau tidak dan kemudian membawa mereka ke kamp tertutup yang disebut Abu Doum, dimana menurut Direktur Kesejahteraan Sosial Negara di Khartoum menyebutkan jumlah anak – anak per Juni 1995 dinyatakan sebanyak enam ratus anak laki-laki dan itu terus bertambah hingga sampai sebanyak seribu anak laki-laki. Hal tersebut terus bertambah sehingga keluarga dari anak – anak yang masih memiliki keluarga tersebut mencari anak mereka yang hilang tanpa adanya bantuan dari pemerintah. Selain itu pemerintah tidak menghormati kebebasan beragama dari anak-anak dengan memberikan mereka pendidikan agama Islam walaupun mereka bukan dari keluarga dan kemudian mengganti nama anak – anak tersebut dengan nama – nama Arab. Hal tersebut juga tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh gerakan kelompok SPLA, dimana gerakan ini telah lama memiliki kebijakan untuk memisahkan anak laki-laki dari rumah dan keluarga mereka untuk pelatihan militer (dan beberapa pendidikan tertentu). Walaupun pada tahun 1993 UNICEF berusaha untuk melakukan perundingan dengan pihak tersebut agar mau memulangkan anak – anak dibawah umur yang dilatih sebagai pasukan SPLA, akantetapi mereka hanya mendapatkan kerjasama dengan pecahan SPLA/M yang dipimpin oleh Riek Machar yaitu kelompok gerakan SSIM/A.⁵³

Selain adanya pelanggaran terhadap anak tersebut, masih banyak lagi pelanggaran – pelanggaran HAM yang dilakukan oleh milisi – milisi Arab yang didukung oleh pemerintah. Dimana militer Sudan dan milisi etnis juga terlibat dalam berbagai bentuk kekerasan fisik yang sangat parah dan berakibat kematian

⁵³. Children in Sudan: Slaves, Street Children and Child Soldiers, <http://www.unhcr.org/refworld/docid/3aaf68264.html> diakses pada tanggal 5 April 2012

pada masyarakat – masyarakat selatan yang dianggap sebagai tawanan perang dan dijadikan budak. Beberapa contoh kekerasan fisik tersebut yang dikutip dari *Afrika Watch* meliputi:

“...sexual abuses including genital mutilation, dismemberment and castration of men, cutting open the abdomens of pregnant women, rape and sexual humiliation of women and young girls, carbon monoxide poisoning by shutting people in a closed cell and directing the exhaust pipe of a military vehicle into the cell, throwing people down wells, severe beatings, tying people up in contorted positions and leaving them for hours in Sudan's desert heat, suffocation, and burning houses with people in them and shooting anyone who tries to escape...”⁵⁴

Beberapa organisasi lainnya juga melaporkan berbagai kasus pelanggaran HAM selama perang saudara tersebut berlangsung, salah satu laporan tersebut dari organisasi Solidaritas Kristen di seluruh dunia yang berpendapat bahwa banyak kasus perbudakan terjadi di Sudan dan hal tersebut dilakukan oleh pemerintah Sudan melalui milisi – milisi Arab yang didukungnya. Sebagai contoh dari tuduhan tersebut, dalam *The Wall Street Journal* pada tanggal 12 Desember 2001, Michael Rubin mengatakan:

“...On Oct. 4, Sudanese Vice President Ali Uthman Taha declared, "The jihad is our way and we will not abandon it and will keep its banner high." ...Between Oct. 23-26, Sudanese government troops attacked villages near the southern town of Aweil, killing 93 men and enslaving 85 women and children. Then, on Nov. 2, the Sudanese military attacked villages near the town of Nyamlell, carrying off another 113 women and children. A Kenyan aide worker was also abducted, and has not been seen since....”⁵⁵

Perbudakan ini telah lama terjadi dan lebih dari sepuluh ribu masyarakat selatan hidup dalam perbudakan pada beberapa dekade terjadinya perang saudara tersebut

⁵⁴. *Opcit.*, Sudan. Human Rights Conditions.

⁵⁵. Human Right in Sudan. http://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Sudan, diakses pada

akibat dari penangkapan secara paksa dan juga jual beli budak yang dilakukan oleh milisi – milisi arab dan jumlah tersebut terus bertambah seiring dengan semakin berkembangnya eskalasi konflik di wilayah tersebut. Selain disebabkan oleh bertambah parahnya eskalasi konflik, semakin bertambahnya jumlah perdagangan budak yang terjadi di Sudan juga disebabkan oleh adanya bantuan – bantuan asing yang mencoba untuk menebus budak – budak masyarakat selatan dari majikannya menyebabkan para pedagang budak tersebut semakin gencar untuk terus melakukan penangkapan – penangkapan masyarakat selatan dan menjadikan mereka sebagai tahanan perang yang kemudian dijual sebagai budak ke berbagai wilayah.

Dengan melihat fakta – fakta tersebut, Amerika Serikat yang selalu menjunjung tinggi masalah HAM menuduh pemerintah Sudan melakukan berbagai macam pelanggaran HAM terhadap masyarakat di Selatan dan kemudian memperketat sanksi Embargo mulai dari tahun 1997 yang sebelumnya pada tahun 1989 telah dijatuhkan oleh Amerika kepada Negara Sudan karena dukungannya terhadap Irak di perang Teluk. Akan tetapi Tuduhan HAM ini pun semakin kehilangan legitimasi moralnya, mengingat pelanggaran HAM berat yang justru dilakukan oleh AS sekarang dengan melakukan berbagai macam invasi ke negara – negara yang dianggap dapat mengancam hegemoni atau pengaruhnya di dunia internasional. Selain itu penggunaan alasan HAM pun semakin lemah, mengingat sikap berbeda AS terhadap pemberontak di Sudan Selatan (SPLA). Pelanggaran – pelanggaran HAM di wilayah tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah ataupun milisi – milisi Arab yang didukung, akan tetapi SPLA juga tidak jauh

berbeda dengan pemerintah. SPLA juga bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia, baik terhadap orang Arab maupun orang – orang kulit hitam Afrika yang dianggap tidak kooperatif dengan kelompok mereka. dimana kelompok pecahan dari SPLA yaitu Nasir Faction menuduh kelompok yang diketuai oleh kolonel Garang telah menyandera lima belas ribu anak, melakukan eksekusi kepada saingan politik mereka tanpa adanya proses hukum yang jelas, membunuh perwira militer yang menentang kelompok tersebut, menyiksa tahanan – tahanan perang dan bahkan menahan lima anggota pendiri SPLA. Di lain pihak, kelompok SPLA yang diketuai oleh kolonel Garang menuduh bahwa Riak Machar yang memimpin Nasir Faction memerintahkan untuk melakukan eksekusi dari lima belas petugas.⁵⁶

Pada Desember 1991, *Africa Watch press release* melaporkan bahwa terjadi pelanggaran HAM yang dilakukan oleh kelompok SPLA terhadap Nuba di pegunungan Nuba, termasuk pembunuhan terhadap pemimpin masyarakat, mencuri persediaan makanan warga dan melakukan perekrutan paksa untuk layanan militer SPLA. Selain itu menurut *Sudanese Catholic Bishops Conference*, SPLA telah melakukan serangan – serangan terhadap imam – imam serta masjid – masjid yang ada dan bahkan melakukan serangan terhadap pastor – pastor dan gereja - gereja. Seperti disebutkan sebelumnya, SPLA juga telah menghancurkan pasokan bantuan, menolak atau memblokir bantuan makanan yang masuk untuk warga sipil di zona perang dan melancarkan serangan terhadap kota – kota yang dikuasai pemerintah pusat. SPLA telah menewaskan warga sipil non-kombatan, membunuh tawanan perang, menanam ranjau - ranjau darat yang menyebabkan

banyak warga sipil yang tidak tahu keberadaan ranjau tersebut menjadi cacat seumur hidup dan bahkan tewas. Dan tidak jauh berbeda juga dari pemerintah pusat dan milisi – milisi Arab, para pemberontak ini juga menjadika tawanannya sebagai budak dan menyuruh mereka melakukan kerja paksa. Afrika Watch juga telah mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan oleh SPLA di Ethiopia, termasuk terlibat dalam perbudakan, kerja paksa dan pergundikan paksa dan pembunuhan warga sipil dalam populasi lokal.⁵⁷

Berbeda dengan yang dilakukan Amerika terhadap pemerintah Sudan yang dijatuhkan embargo dan memutuskan hubungan kerjasamanya, pemerintah Amerika Serikat cenderung diam untuk masalah pelanggaran HAM yang dilakukan oleh SPLA dan bahkan menurut beberapa pihak, Amerika Serikat justru mempersenjatai SPLA. *The Sunday Times* (17/11/1996) juga pernah mengungkap, pemerintah Clinton meluncurkan kampanye untuk membuat ketidakstabilan pemerintah Sudan dengan mengucurkan lebih dari 20 miliar dolar peralatan militernya dikirim ke Eritrea, Etiopia, Uganda, termasuk ke pemberontak SPLA.⁵⁸

Setelah melebar dan memanasnya konflik di Darfur, berbagai lembaga organisasi internasional seperti *U.N. Commission on Human Rights*, *International Criminal Court* (ICC) menyatakan telah terjadinya praktek *Genocide* yang banyak menelan korban sipil. Dimana pemerintah pusat Sudan yang menjadi aktor utama dalam pelanggaran HAM tersebut melalui kelompok milisi Arab yang didukungnya yaitu Janjaweed. Dimana dalam genosida yang terus berlangsung tersebut menyebabkan masyarakat di Darfur pergi bersembunyi ke tempat –

⁵⁷. *Opcit.*, Sudan. Human Rights Conditions.

⁵⁸. *The Guardian* : Minyak, Motif Amerika di Sudan. <http://m.bizhub.tahrir.or.id/?p=1011>. diakses

tempat persembunyian atau bahkan dibunuh oleh kelompok Janjaweed. *Genocide* di Darfur telah merenggut 400.000 jiwa dan menelantarkan lebih dari 2.500.000 orang. Lebih dari seratus orang terus meninggal setiap hari dan lima ribu mati setiap bulan. Akan tetapi Pemerintah Sudan membantah perkiraan tersebut dan menyangkal hubungan dengan Janjaweed itu.⁵⁹

Selain menggunakan masalah – masalah pelanggaran HAM, Amerika juga memainkan intervensinya di wilayah ini dengan mengusung isu – isu terorisme. Dimana Amerika menuduh pemerintah pusat memberikan dukungannya terhadap kelompok terorisme internasional. Hal inilah yang kemudian menyebabkan pada 20 Agustus 1998, sejumlah pesawat tempur AS menghancurkan pabrik Asy-Syifa, pabrik farmasi terbesar di Sudan. Pemerintah AS yang saat itu dipimpin oleh Bill Clinton menjelaskan, bahwa penyerangan ini dilakukan karena pabrik tersebut diduga memproduksi sejumlah bahan yang digunakan untuk membuat senjata kimia. Pejabat AS meyakini keberadaan pabrik itu mempunyai koneksi dengan Osama bin Laden, pemimpin dari gerakan terorisme internasional yang dicari – cari oleh Amerika. Akan tetapi hal tersebut kemudian tidak bisa dibuktikan yang akhirnya menyebabkan serangan Amerika Serikat ke pabrik Asy-Syifa’ tersebut mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Penyerangan Amerika Serikat di Sudan tersebut memakan banyak korban sipil yang mati akibat ketiadaan obat yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di wilayah tersebut baik yang menjadi korban dari perang saudara tersebut. Meski tidak ada hubungan antara tragedi kemanusiaan Sudan saat ini dengan peristiwa pengeboman itu, tetapi ada sejumlah

⁵⁹. *Genocide in Darfur*. <http://www.unitedhumanrights.org/genocide/genocide-in-sudan.htm>

hal yang harus dipertimbangkan berkaitan dengan pengeboman tersebut. Dan dengan adanya pengeboman pabrik tersebut menyebabkan pertanyaan besar akan masalah HAM yang selalu diusung oleh Amerika dalam setiap intervensinya.

Dengan terjadinya konflik – konflik ataupun perang saudara yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasaan salah satu pihak yang memiliki kepercayaan dan kebudayaan yang berbeda pastinya tidak terlepas dari berbagai macam bentuk pelanggaran seperti perbudakan, pemaksaan dalam menentukan kepercayaan beragama hingga sampai pada perdagangan manusia. Amerika yang merasa sebagai sebuah negara yang memiliki kekuatan besar dalam dunia internasional, merasa berhak ataupun berkewajiban untuk segera menyelesaikan konflik – konflik tersebut dengan berbagai macam bentuk upaya – upaya intervensi dan dengan berbagai sarana politik luar negeri yang dimilikinya. Dimana dalam upaya – upaya intervensi ini tidak hanya mengusung penegakkan HAM dan menghentikan gerakan terorisme internasional tetapi intervensi Amerika dengan berbagai upayanya ini juga diikuti oleh kepentingan – kepentingan nasionalnya di wilayah negara Sudan.

B. Dukungan Militer Amerika Kepada Pemberontak Sudan Selatan.

Pada awalnya Amerika Serikat tidak memiliki pengaruh yang besar antara kedua belah pihak baik itu pihak pemberontak maupun pihak pemerintah pusat yang saat itu masih terbawa oleh pengaruh Inggris. Akantetapi kemudian Amerika terus menerus mencoba untuk menancapkan pengaruhnya di wilayah tersebut dan mulai ingin menghilangkan pengaruh Inggris yang dianggap imrealis dan tidak

sesuai dengan prinsip politik luar negeri Amerika Serikat. Adanya keinginan untuk membendung hegemoni atau pengaruh Komunis yang disebarkan oleh Uni Soviet juga menyebabkan Amerika benar – benar ingin menancapkan pengaruhnya di wilayah ini dengan berbagai cara. Melalui antek – anteknya Amerika secara sembunyi – sembunyi mendukung pihak pemberontak dan juga pihak pemerintah pusat. Amerika pun dirasa tidak konsisten dalam memberikan dukungan, hal tersebut dikarenakan Amerika memberikan dukungan bukan hanya berdasarkan HAM atau kemanusiaan saja melainkan juga berdasarkan pada kepentingan nasionalnya.

1. Kekuatan Militer Pemberontak Selatan Sebelum Bantuan Amerika.

Pemberontak Selatan pertama yang biasa disebut The Torit Mutiny ini pada awalnya adalah sebuah pasukan yang dibuat oleh Inggris untuk menjaga keamanan di daerah perbatasan. Seiring dengan pergantian pemerintahan setelah merdeka dan adanya ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat wilayah selatan, menyebabkan keinginan dari pasukan tersebut untuk memulai pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Gerakan pemberontakan ini masih berskala kecil dan dapat dikatakan tidak mempunyai dampak yang penting dalam gerakannya menentang pemerintah pusat yang memiliki banyak dukungan dari negara – negara seperti Rusia dan Mesir. Walaupun begitu, tetap saja, pemberontakan tersebut pada akhirnya menyebabkan adanya banyak gerakan – gerakan pemberontakan lain bermunculan di daerah Selatan. Gerakan – gerakan tersebut kemudian membentuk satuan pasukan yang dikenal sebagai pasukan

gerilya Anya-Nya. Dan dari gerakan tersebutlah kemudian terjadinya perang sipil pertama di wilayah tersebut.⁶⁰

Berbeda dengan gerakan pemberontak sebelumnya yaitu The Torit Mutiny yang melakukan pemberontakan dengan skala kecil dikarenakan keterbatasan persenjataan, sedangkan gerakan pemberontakan yang terdiri dari gabungan gerakan – gerakan yang ada saat itu yaitu Anya Nya ini melakukan operasi pemberontakan dalam skala yang lebih besar serta pasokan persenjataan yang lebih mendukung. Dimana sebelumnya pada saat gerakan pemberontakan di Torit Mutiny pada tahun 1955, persenjataan yang dimiliki oleh gerakan ini, mayoritas hanya dicuri dari departemen kepolisian Sudan dan juga operasi pergerakan untuk melakukan pemberontakan masih dilakukan secara diam – diam di daerah - daerah hutan dan tempat-tempat yang tersembunyi. Sedangkan pemberontakan yang dilakukan oleh pasukan Anya-Nya tergolong lebih terbuka dan juga adanya pasokan persenjataan yang banyak dibantu oleh konflik yang terjadi di luar wilayah Sudan. Persenjataan – persenjataan yang dikirim oleh negara lain dari negara-negara Arab, serta Afrika untuk gerakan Simba di Kongo yang malah jatuh ke tangan pasukan pemberontakan Anya-Nya menjadi tambahan persenjataan pasukan Anya-Nya. Gerakan pemberontakan ini telah berlangsung selama beberapa tahun, yakni dari tahun 1963-1969.⁶¹

⁶⁰. South Sudan celebrates the first rebellion, the Torit Mutiny, <http://www.sudantribune.com/South-Sudan-celebrates-Torit,28325>, Diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

⁶¹. Douglas H Johnson, *The root causes of Sudan's civil war*. Kampala: The international African

Pada tahun 1960an tersebut Israel juga telah memberikan bantuan militer terhadap pihak pemberontak dengan memberikan senjata - senjata Arab yang disita dari perang dan bahkan ada juga anggapan yang menyatakan bahwa pasukan Anya - Nya adalah hasil dari didikan militer Israel. Pada tahun 1986 kelompok pemberontak ini diperkirakan memiliki 12.500 pengikut yang disusun dalam dua belas batalyon dan dilengkapi dengan senjata ringan dan beberapa mortir.⁶² Hal ini diimbangi dengan bantuan persenjataan lebih besar yang mengalir ke pemerintah pusat secara berturut-turut oleh Soviet pada tahun 1968.⁶³ Akan tetapi ada anggapan yang mengatakan bahwa jauh sebelumnya, Amerika juga dipercaya telah menghasut masyarakat selatan untuk melakukan pemberontakan terhadap pemerintah pusat di Khaortum dan juga memberikan pasokan persenjataan serta memberikan pelatihan militer kepada anggota SPLA/M melalui salah satu sarana pencapaian politik luar negerinya yaitu CIA, yang telah lama berada di Sudan Selatan dan hal tersebut sebenarnya telah lama dilakukan oleh Amerika yang tentu saja dilakukan secara sembunyi - sembunyi.⁶⁴ Dengan melihat hal ini, dapat dikatakan Amerika telah memainkan intervensinya melalui memprovokatori masyarakat selatan untuk mulai melakukan pemberontakan atau juga dengan melakukan intervensi dalam bentuk subversi dengan mengatur konflik yang terjadi serta dengan cara mendukung suatu potensi pemberontak di negara tersebut.

⁶² Sudan People's Liberation Army (SPLA), Sudan People's Liberation Movement (SPLM), <http://www.fas.org/irp/world/para/spla.htm>, diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

⁶³ Sudan-First Civil War, <http://www.globalsecurity.org/military/world/war/sudan-civil-war1.htm>, diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

⁶⁴ Kolaborasi CIA-Mossad Hancurkan Sudan, <http://www.intelijen.co.id/wawasan/1367-1414>, diakses pada tanggal 5 Maret 2012.

Walaupun begitu, saat itu bantuan atau dukungan militer dari Amerika kepada pihak pemberontak belum terlihat atau terdeteksi, akan tetapi dapat dikatakan bahwa kekuatan militer kedua belah pihak adalah seimbang. Hal ini diakibatkan oleh bantuan – bantuan asing baik di pihak pemerintah pusat maupun pemberontak selatan. Keseimbangan kekuatan tersebut tidak lantas membuat perang saudara tersebut terhenti akan tetapi terus menerus terjadi. Dan pada akhirnya setelah melalui berbagai ketegangan yang terjadi dan dengan mempertimbangkan kekuatan pemberontak yang juga patut diperhitungkan tersebut, maka dibuatlah perjanjian antara pemerintah pusat dan pihak pemberontak untuk mengakhiri perang tanpa pemenang tersebut. Perang tersebut dapat terhenti sementara dan kembali terjadi setelah presiden yang saat itu berkuasa yaitu An Numaeri tiba – tiba mencampakkan perjanjian damai tersebut.

Sebenarnya pada saat An Numaeri masih berkuasa, Amerika telah memberikan izin pemerintah Sudan menggunakan peralatan militernya, untuk menghalau gerakan – gerakan penyusup yang dapat menambah besar gerakan pemberontak di selatan. Saat pemerintahan An Numaeri sampai dengan Sadiq Amerika masih memberikan dukungannya terhadap pemerintah pusat Sudan. Sedangkan pada tahun – tahun saat SPLA/M menjadi lebih terintegrasi, gerakan ini banyak menerima bantuan militer dan keuangan dari Kolonel Gaddafi di Libya dan juga dari Ethiopia.⁶⁵ Akan tetapi setelah kejatuhan An Numaeri dan pemerintahan berganti pada tahun 1986, yang saat itu adalah Sadiq Al-Mahdi, Libya yang sebelumnya memberikan dukungan kepada pihak pemberontak

⁶⁵ The British Sudanese Public Affairs Council, *The SPLA: Fit To Govern?* The European

berbalik memberikan dukungannya ke pemerintah pusat. Adanya bantuan finansial dan militer dari Libya dan Amerika yang saat itu masih memberikan dukungannya terhadap pemerintah pusat menyebabkan pasukan militer Sudan sangat kuat dan mengurangi keinginan dari pemerintah pusat untuk melakukan perjanjian damai kembali.⁶⁶ Walaupun pihak pemberontak juga masih mendapatkan banyak bantuan persenjataan dari pihak asing seperti Israel, Ethiopia dan Uganda, sistem pertahanan SPLA/M melemah dikarenakan adanya serangan – serangan dari kelompok – kelompok radikal yang didukung oleh Sadiq Al Mahdi. Tetapi kemudian akhirnya Sadiq Al Mahdi yang dikatakan bersedia untuk terlibat dengan prinsip demokratis yang diagung-agungkan Amerika, berkeinginan untuk melakukan gencatan senjata dengan pihak pemberontak, yang kemudian berakhir dengan kudeta yang dilakukan oleh komandan Omar Al-Bashir yang menentang keputusan Sadiq untuk melakukan negosiasi dengan berbagai persyaratan yang diajukan oleh pihak SPLA/M tersebut. Dan dengan bergantinya rezim saat itu akibat kudeta yang terjadi, juga menyebabkan Amerika kemudian bertolak untuk mendukung gerakan SPLA/M untuk mendapatkan kepentingannya.

2. Kekuatan Militer Pemberontak Selatan Setelah Bantuan Amerika.

Keterlibatan pihak atau negara luar dalam konflik internal Sudan sangat berpengaruh dalam hal keberlangsungan jalan serta arah konflik yang terjadi di Sudan. Mulai dari negara tetangga seperti Ethiopia, hingga Amerika Serikat ikut berpengaruh terhadap berlangsungnya perang sipil tersebut. Hubungan antara

⁶⁶ Douglas H Johnson, *The root causes of Sudan's civil war*, Kampala: The international African

Amerika dan salah satu wilayah di Afrika ini, dapat di lihat terutama pada kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Sudan. Sepanjang sejarahnya, Amerika terlihat banyak memberikan bantuan kepada pemerintahan pusat di Khartoum, Akan tetapi kemudian terjadi perubahan pada masa pemerintahan Omar Al-bashiir.

Sejak pemerintahan Omar Al-Bashir, Amerika merasa bahwa Omar Ba'ashir yang saat itu memegang kekuasaan tidak mendukung politik luar negeri dan kepentingan nasionalnya di wilayah, menyebabkan Amerika berpindah untuk mendukung kelompok pemberontak Selatan. Selain itu adanya penyebaran pengaruh Islam menjadi ancaman yang berarti bagi hegemoni Amerika di wilayah tersebut serta diterapkannya kebijakan dari pemerintahan Omar Bashir yang memberlakukan kembali hukum Islam di negaranya. Selain itu, pemerintah pusat pun mulai mendukung terorisme serta adanya dukungan Omar Al-Bashiir terhadap Saddam Hussein dalam *Gulf war* (Perang Teluk) juga merupakan alasan mengapa Amerika Serikat kehilangan kepercayaannya terhadap pemerintahan pusat yang saat itu dan kemudian menyebabkan dukungan - dukungan Amerika terhadap pemerintah pusat beralih kepada dukungan Amerika ke pihak pemberontak Selatan. Pada awal berpindahnya dukungan Amerika dari pemerintahan pusat ke pihak pemberontak, bantuan - bantuan Amerika Serikat masih dalam jumlah yang relatif kecil.

Terhentinya dukungan dari Amerika Serikat kepada pemerintah pusat tersebut ternyata tidak membawa dampak yang signifikan pada berlangsungnya perang yang telah lama terjadi antara pihak pemerintah dan pihak pemberontak

Dan dengan adanya perubahan posisi Amerika Serikat di awal tahun 1990an itu, semakin memberikan banyak manfaat bagi kekuatan militer pihak pemberontak. Sejak perubahannya, Amerika Serikat telah memberikan kontribusi bantuan perangkat militer secara tidak langsung, melalui Ethiopia dan Uganda. Selain itu pemberontak Selatan pun mendapatkan dukungan dari negara lain seperti Kuba, Chad dan Israel yang juga telah memberikan pasokan persenjataan serta memberikan pelatihan militer kepada anggota SPLA/M.⁶⁷ Walaupun bantuan dari Amerika untuk pemerintah pusat terhenti, hal tersebut tidak mengurangi kekuatan militer pasukan Sudan, ini dikarenakan oleh persenjataan untuk pemerintah pusat tidak berkurang dan yang terus menerus dipasok dari berbagai negara seperti China, Yaman dan negara – negara Islam dan bekas pecahan Rusia untuk membantu pemerintah pusat memenangkan konflik. Hal tersebutlah yang menjadikan perang sipil tersebut tetap berlanjut dengan persenjataan yang semakin kompleks dengan kekuatan militer masing – masing pihak tetap seimbang, menyebabkan pertempuran yang jauh lebih berdarah dibandingkan dengan perang sipil pertama. Dan dengan banyaknya pasokan persenjataan dari pihak – pihak asing, perang saudara di wilayah tersebut bukan terselesaikan melainkan menjadi lebih buruk hingga untuk menyelesaikan konflik tersebut harus dilakukan perjanjian damai antara kedua pihak dengan mediator pihak – pihak asing yang pada akhirnya perjanjian damai tersebut membawa wilayah terluas di Afrika tersebut terbagi menjadi dua negara yang berbeda.

⁶⁷. Global trade, local impact: Arms transfers to all sides in the Civil War in Sudan. <http://www.hrw.org/reports08/sudan/>. Diakses tanggal 5 Maret 2012

3. Bentuk – Bentuk Dukungan Militer Amerikat Serikat Terhadap Pemberontak Selatan.

Sebelumnya pada tahun 1984, Amerika terlihat hanya memberikan bantuan - bantuan peralatan militer Amerika untuk menghalau masuknya penyusupan gerilyawan ke daerah Sudan dan juga bantuan pangan ke daerah – daerah yang terkena efek dari konflik yang terjadi antara pihak pemberontak dan pihak pemerintah pusat. Hal tersebut terus berlanjut hingga pemerintahan setelah An Numaeri dan kemudian bertolak mendukung pemberontak selatan, hal tersebut terjadi dikarenakan oleh adanya perubahan kebijakan dari pemerintahan Omar Ba'asir yang dirasa Amerika tidak mendukung kepentingan nasionalnya dan malah mendukung Irak dan terorisme internasional. Akhirnya pada tahun 1991, Amerika Serikat menarik semua personil diplomatik dari Sudan dan menutup kedutaan besarnya di Khartoum.⁶⁸ Begitu juga dengan bantuan – bantuan baik itu bantuan militer maupun ekonomi ke wilayah Sudan terhenti pada tahun tersebut dan amerika malah berbalik dengan membantu pihak pemberontak dengan memberikan dukungan militernya Amerika Serikat.

Setelah itu pada tahun 1995, pemerintah Amerika Serikat mulai secara militer, diplomatik dan finansial mendukung SPLA, dan juga menjamin basis belakang bagi organisasi tersebut melalui Ethiopia, Eritrea dan Uganda.⁶⁹ Dan pada tahun 1996 pemerintah AS memutuskan untuk mengirim hampir \$ 20 juta dari peralatan militer melalui Negara – negara seperti Ethiopia, Eritrea dan

⁶⁸ Sudan-United State, http://www.mongabay.com/history/sudan/sudan-united_states.html, diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

⁶⁹ The British Sudanese Public Affairs Council, *The SPLA Fit To Govern? The European*

Uganda untuk membantu oposisi Sudan menggulingkan rezim Khartoum saat itu. Bantuan – bantuan tersebut adalah bantuan militer yang dikatakan sebagai bantuan tidak mematikan seperti radio, seragam, sepatu bot dan tenda – tenda, bantuan yang ditujukan untuk peningkatan pertahanan bagi pihak pemberontak. Tetapi para pejabat Amerika Serikat membantah bahwa bantuan militer tersebut untuk SPLA dan SAF.⁷⁰ Dan sejak saat itu bantuan perangkat militer Amerika terus menerus disalurkan secara sembunyi- sembunyi melalui negara – negara yang menerima bantuan militer Amerika seperti Israel, Uganda, Ethiopia dan Eritrea.

Dan pada tahun 1998 dengan bantuan militer yang terus menerus disalurkan oleh Amerika melalui negara – negara tetangga Sudan, Amerika tiba – tiba menyerang pabrik kimia milik Sudan yang berada di Khartoum dengan menggunakan alasan bahwa tempat yang diserangnya tersebut adalah tempat pemerintah Sudan yang saat itu dikatakan mendukung terorisme internasional, menyembunyikan para teroris yang dapat mengancam keamanan dunia.

Pada masa transisi yang dibentuk oleh perjanjian damai mulai dari tahun 2005 sampai 2011, Amerika Serikat telah memberikan dukungannya atas pemisahan kedua wilayah tersebut. Dimana Amerika Serikat telah membangun barak – barak penampungan, kapal – kapal kecil, memberikan peralatan- peralatan persenjataan serta melatih pasukan – pasukan SPLA dalam segala hal seperti perlindungan khusus, perawatan medis, keaksaraan dasar dan pelatihan senjata

⁷⁰ Sudan People's Liberation Army (SPLA), Sudan People's Liberation Movement (SPLM), <http://www.fsa.org/imp/world/news/cnle.htm> diakses pada tanggal 13 Maret 2012

tempur untuk pasukan – pasukan tersebut.⁷¹ Pemberian bantuan untuk mendukung pemisahan diri Sudan Selatan dari Sudan Utara oleh Amerika ini tidak dijelaskan bentuk – bentuk peralatan militer yang dijadikan bantuan oleh Amerika, kebanyakan hanya menyebutkan jumlah alokasi dana yang diberikan untuk mengembangkan kekuatan militer SPLA. Disebutkan juga bahwa Amerika membantu transformasi SPLA dari kekuatan sebagai gerilyawan menjadi militer reguler di bawah Pemerintah Sudan Selatan setelah adanya pemisahan otonomi melalui perjanjian dengan IGAD sebagai mediatornya, atau sebagai pasukan untuk wilayah selatan nantinya. Sebagai bagian dari bantuan ini, Departemen Luar Negeri AS akan mendukung penciptaan dan pengembangan pelatihan dan tim penasehat militer di Juba, Sudan Selatan untuk memberikan pelatihan dan bimbingan kepada prajurit SPLA dan perwira senior.⁷² Hal ini juga terbukti dari pernyataan Ezekiel Lol Gatkuoth yang adalah wakil ketua SPLA/M dalam wawancaranya dengan Washington Post yang menyatakan bahwa :

“AS tak segan-segan mengucurkan dana US\$ 1 miliar pertahun untuk Sudan Selatan sejak 2009. Dana itu dimaksudkan untuk mempersiapkan kemerdekaan Sudan Selatan dengan membangun infrastruktur dan pelatihan militer”⁷³

Walaupun sebenarnya tanpa bantuan dari Amerika kekuatan masing – masing pihak dapat dikatakan seimbang dengan bantuan – bantuan dari berbagai pihak

⁷¹. VI. MILITARY SUPPORT FOR SUDANESE OPPOSITION FORCES, http://www.hrw.org/legacy/reports/reports98/sudan/Sudarm988-07.htm#P771_157529, Diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

⁷². Document - Sudan: Further information on arms shipments to Sudan's Southern Kordofan, <http://www.amnesty.org/en/library/asset/AFR54/022/2011/en/3d2f8a5c-7f9d-4d78-b133-be8d0f818954/afr540222011en.html>, diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

⁷³. Amerika dan Israel Otak di Balik Pecahnya Republik Sudan, <http://ilbambudiraspati.wordpress.com/2011/04/28/amerika-dan-israel-otak-di-balik-pecahnya-republik-sudan/>

asing yang memiliki kepentingan, hanya tetap saja Amerika memiliki setidaknya sedikit pengaruh dalam tubuh SPLA sebagai gerakan pemberontak yang didukung oleh bantuan – bantuan militernya Amerika. Dengan dukungan Amerika dan sekutu – sekutunya di wilayah tersebut menyebabkan SPLA/M semakin berani dalam mengambil langkah untuk mempertahankan keinginannya mendapatkan kesejahteraan di wilayah selatan Sudan yang sering diekplorasi sumber daya alamnya demi kepentingan atau kekayaan yang hanya dirasakan oleh wilayah utara. selain itu dengan dukungan yang terus menerus diberikan oleh Amerika dan negara – negara sekutunya, SPLA/M semakin percaya diri untuk memisahkan diri dari negara Sudan yang menguasainya. Dan hasil dari hal kuatnya kedua belah pihak dalam mempertahankan kepentingannya adalah memanasnya eskalasi konflik yang memakan korban sangat banyak selama perang saudara tersebut berlangsung dan pada akhirnya perjanjian damai yang akhirnya mengakibatkan kedua wilayah terbagi menjadi dua negara berbeda.

C. Penjatuhan Sanksi Ekonomi dan Militer Terhadap Pemerintah Sudan.

Setelah banyak memberikan bantuan persenjataan untuk pihak pemberontak Selatan untuk membantu Sudan Selatan terlepas dari pemerintah pusat di Khartoum dan mendirikan negara baru yang berbeda dari Negara Sudan. Sejak tahun 1989 yang bersamaan dengan kepemimpinan Omar al-Bashir di Sudan, Amerika Serikat mengambil kebijakan radikal terhadap negara ini.

Kebijakan radikal yang dimulai oleh adanya pernyataan Omar al-Bashir yang

menyatakan akan menjadikan Islam sebagai sumber hukum dan undang-undang di seluruh penjuru negara tersebut, dimana pastinya sangat melanggar hak asasi manusia di wilayah selatan yang notabenenya mempunyai aturan atau hukum agamanya sendiri dan adanya penjualan hasil minyak ke China atau lebih tepatnya bekerjasama dalam perminyakan dengan China. Dan tanggapan dari Amerika tentang pernyataan dan sikap Sudan tersebut adalah dengan menerapkan berbagai sanksi politik dan ekonomi.

1. Perekonomian Sudan Sebelum Terjadinya Embargo.

Pada awal tahun 1970an PDB per kapita di Sudan tumbuh mencapai 170%, akan tetapi hal tersebut tidak bertahan lama dengan pendapatan yang menurun menjadi 34% pada tahun 1980an dan hal tersebut terus berlanjut sampai pada tahun 1990an pendapatan dari negara ini menurun hingga sebesar 26%.⁷⁴ Pada tahun 1972 pemerintah Sudan yang lebih pro ke Barat berusaha untuk mengeksport tanaman pangan ke negara – negara barat. Namun, harga komoditas menurun selama tahun 1970an menyebabkan masalah ekonomi bagi Sudan. Pada masa – masa pemerintahan An Numaeri ini keadaan ekonomi Sudan memburuk, dimana hutang luar negeri membengkak, naiknya harga – harga komoditas akibat dari kekeringan, kekurangan peningkatan input untuk impor dan juga adanya efek dari perang saudara yang terus memanas di selatan dan akhirnya menyebabkan rezim An Numaeri di kudeta. Setelah beberapa tahun dalam pemulihan perekonomian dengan bantuan IMF dan negara – negara donor yang lain untuk membantu meningkatkan perekonomian Sudan yang sebelumnya terpuruk dan hal

⁷⁴ F. ... 66 ... // ... / ... of Sudan ... 13

tersebut tidak cukup membantu penyelesaian krisis tersebut. Akan tetapi setidaknya dengan adanya bantuan – bantuan dari negara pendonor, pemerintah pusat tidak terlalu kesulitan dalam menghadapi pihak pemberontak yang saat itu menjadi fokus utama penyelesaian krisis di wilayah tersebut. Pada tahun 1980an, Amerika Serikat masih melanjutkan bekerjasamanya dengan Pemerintah Sudan untuk mengupgrade peralatan militer dan logistik atau bahan pangan. Hingga pada tahun 1989 setelah terjadinya kudeta yang dipimpin Omar Bashir, dan dengan berkuasanya rejim baru tersebut dan segala kebijakan yang baru pula menyebabkan banyak negara - negara donor seperti Eropa, Amerika Serikat dan Kanada menghentikan bantuan - bantuan pembangunan resmi, tetapi bantuan – bantuan kemanusiaan tetap berjalan ke daerah – daerah yang terkena dampak dari konflik.⁷⁵

2. Perekonomian Sudan Setelah Penjatuhan Sanksi Embargo.

Setelah terjadinya kudeta oleh Omar Ba'ashir dan adanya keinginan pemerintah yang berkuasa tersebut untuk menerapkan hukum islam menyebabkan Amerika menghentikan bantuan – bantuannya terhadap pemerintah pusat. Penghentian bantuan – bantuan tersebut tidak terlalu berdampak banyak terhadap perekonomian maupun militer Sudan yang banyak dibantu oleh Amerika sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan Sudan mendapatkan pendapatan yang lebih dari hasil cadangan minyak yang saat itu dikuasai pemerintah pusat dan dengan begitu memungkinkan pemerintah untuk membeli persenjataan dengan sistem

⁷⁵. Background Note: Sudan, <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/5424.htm>, diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

persenjataan yang modern dan sebagian besar peralatan militer tersebut berasal dari China, Rusia, dan Libya.

Pada November 1997, Amerika Serikat secara sepihak memperketat sanksi terhadap pemerintah Sudan tersebut. Amerika menuding Sudan sebagai negara yang mensponsori terorisme. Presiden Amerika Serikat Bill Clinton juga menuduh pemerintah Sudan memberikan dukungan bagi terorisme internasional, melakukan upaya-upaya untuk mendestabilisasi pemerintahan negara – negara tetangga dan melakukan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk perbudakan dan penolakan kebebasan beragama.⁷⁶ Dengan begitu, seperti yang biasanya terjadi pada negara-negara yang terdaftar sebagai negara sponsor terorisme, negara – negara tersebut tidak akan dapat menerima bantuan atau membeli senjata dari Amerika Serikat dan juga adanya larangan untuk melakukan perdagangan bilateral dengan negara – negara yang telah dimasukkan kedalam daftar hitam karena memberikan dukungan kepada terorisme internasional.

Dengan adanya embargo ini, Amerika berusaha untuk menekan pemerintah pusat agar segera mengaplikasikan pemisahan antara Sudan Utara dan Sudan Selatan yang telah dibahas dan disetujui pada perjanjian – perjanjian damai untuk menghentikan perang saudara yang berkepanjangan sebelumnya dapat segera dilaksanakan. Akantetapi embargo dari Amerika ini sebenarnya hanya mempunyai sedikit dampak pada awal dijatuhkannya yaitu pada tahun 1997 yang juga diikuti oleh hutang luar negeri dan kerugian akibat perang melawan pemberontak selatan. Dan ketika sampai pada tahun 1999, embargo tersebut tidak

⁷² VI. MILITARY SUPPORT FOR SUDANESE OPPOSITION FORCES, http://www.hru.org/legacy/reports/reports08/sudan/Sudarm08%07.htm#P771_157520. Diakses

memiliki dampak yang berarti bagi perekonomian Sudan, mengingat tidak adanya kerjasama militer maupun ekonomi antara kedua belah pihak yang disebabkan oleh pemutusan hubungan bilateral terhadap negara Sudan oleh Amerika pada tahun 1989. Dan bahkan pada tahun 1999, perekonomian Sudan meningkat dengan dimulainya ekspor minyak, perekonomian Sudan lambat laun mengalami pertumbuhan yang signifikan melalui hasil – hasil pertanian dan juga tentu saja ekspor minyak ke negara – negara pendukungnya. Walaupun kemudian pada tahun 2009, negara ini kembali ke titik terendah dalam persentasi pembangunan ekonomi yang diharapkan oleh Sudan dengan banyaknya hutang di IMF.⁷⁷ Dan juga ada anggapan bahwa penggunaan pendapatan tersebut lebih banyak digunakan untuk mengembangkan kekuatan militer pasukan Sudan menyebabkan perekonomian negara ini kembali menurun.

Tidak ada dampak signifikan terhadap perekonomian Sudan dengan adanya pemberlakuan embargo tersebut. Disamping adanya masyarakat yang menderita kelaparan yang dikarenakan oleh perang saudara yang berkepanjangan, perekonomian Sudan terus meningkat dengan adanya ekspor minyak ke berbagai perusahaan - perusahaan dari China, Malaysia, India, Kuwait dan Uni Emirat Arab. Sanksi ini hanya menyebabkan perusahaan – perusahaan dari Eropa dan Amerika Serikat keluar dari Sudan.⁷⁸ Walaupun embargo tersebut tidak terlalu memberi dampak yang besar terhadap perekonomian Sudan, tetapi tekanan Amerika untuk segera menyelesaikan masalah Darfur yang semakin memanas dan

⁷³. Food Security In Sudan, <http://catatandhila.wordpress.com/2011/12/09/food-security-in-sudan/>, diakses pada 13 Maret 2012.

⁷⁴. Despite embargo, Sudan builds a booming economy based on oil - Africa & Middle East - International Herald Tribune, <http://www.nytimes.com/2006/10/24/world/africa/24iht>

juga bertambahnya tuduhan – tuduhan pelanggaran HAM yang terjadi di Darfur, dimana sebelumnya dilancarkan oleh Amerika dan kemudian lebih diperluas oleh organisasi ICC yang hasilnya bukan menyelesaikan konflik di wilayah tersebut, malah semakin membuat keadaan bertambah rumit. Dimana pada Maret 2009, Hakim di ICC menyetujui sebuah surat perintah penangkapan Omar Ba’ashir dengan lima tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan yaitu pembunuhan, pemusnahan, pemindahan paksa, penyiksaan dan pemerkosaan. Dan dua tuduhan kejahatan perang yaitu serangan terhadap penduduk sipil dan penjarahan. Pada bulan Juli 2010, pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk yang kedua kalinya ini dengan tuduhan genosida yang mempersulit perjalanan dan urusan internasional kepala negara tersebut.⁷⁹ Langkah ICC ini telah mengucilkan Sudan serta membatasi gerak Presiden tersebut untuk mengunjungi negara-negara sahabat di kawasan itu seperti Kenya yang akhirnya mengikuti keinginan ICC untuk menangkap Omar Ba’ashir jika kembali ke Kenya sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi organisasi ini, begitu juga dengan Chad yang juga ikut meratifikasi. Kepala negara Sudan ini pun tidak bisa mengikuti pertemuan – pertemuan tingkat tinggi yang diselenggarakan di wilayah Afrika maupun Eropa, karena adanya paksaan dari negara – negara Eropa agar presiden Omar Ba’ashir tidak mengikuti peretmuan tingkat tinggi dan jika Omar Ba’ashir mengikuti acara tersebut maka negara- negara tersebutlah yang tidak akan menghadiri pertemuan tingkat tinggi yang diadakan. Hal ini dibuktikan melalui menteri luar negeri Libya Moussa Koussa yang mengungkapkan :

⁷⁹. Goodspeed Analysis: Sudanese referendum may reignite civil war,

"Kami telah meminta Presiden al-Bashir tidak menghadiri pertemuan puncak Uni Eropa-Afrika karena upaya luar biasa yang diberikan oleh Libya untuk menjadi tuan rumah KTT dan tidak merusaknya karena ancaman Eropa untuk tidak hadir jika Presiden al-Bashir menunjukkan diri di KTT nantinya".⁸⁰

Walaupun pada awalnya Amerika juga mengatakan bahwa Omar Ba'ashir melakukan pelanggaran HAM, tetapi langkah ICC dan sikap yang ditunjukkan oleh negara – negara Eropa agar pemimpin negara Sudan tersebut menyerahkan diri, bertolak belakang dengan kepentingan Amerika yang ingin kedua wilayah berpisah atas hasil referendum. Hal tersebut membuat Amerika memberikan penawaran kepada Ba'ashir, yang telah didakwa oleh Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag atas kejahatan terhadap kemanusiaan di Darfur untuk mendukung pelaksanaan butir 16 aturan ICC yang dapat menunda penangkapan Ba'ashir selama satu tahun dan penundaan ini bisa diperpanjang lagi.⁸¹ Dan juga berjanji akan menormalkan hubungan dengan memberikan bantuan dalam penghapusan utang, mendukung akses ke bantuan multilateral dan bilateral, mencabut sanksi dan meninjau kembali status Sudan sebagai negara pendukung terorisme. inilah yang kemudian akhirnya menyebabkan pemerintahan Omar Ba'ashir mau tidak mau mempercepat untuk merealisasikan usulan diadakannya referendum seperti yang telah direncanakan pada perjanjian tahun 2005 lalu.⁸²

Jika referendum pemisahan tersebut dilaksanakan seperti yang telah disetujui, sebagaimana janjinya, Amerika akan langsung mengakui Sudan Selatan sebagai negara merdeka pada Juli 2011 pada saat kemerdekaan Sudan Selatan

⁸⁰. Sudan Outraged After Libya Asks Barshir to Skip Africa-EU Summit, <http://thenewdispensation.wordpress.com/2010/11/>, Diakses tanggal 13 Maret 2012.

⁸¹. Sudan Mebutuhkan Khilafah, Jurnal Ekonomi, 07 Maret 2009.

⁸² Ted Dagne, Specialist in African Affairs, Sudan: The Crisis in Darfur and Status of the North

sebagai negara baru di Afrika dideklarasikan dan akan segera mengevaluasi penilaian terhadap Sudan yang selama ini dianggap sebagai negara sponsor terorisme. Hal ini pun terbukti dengan hasil liputan *Christian Science Monitor* (CSM) yang melaporkan bahwa pada 11 November 2010, Senator Amerika, John Kerry mengunjungi Khartoum dengan membawa pesan dari Presiden Barack Obama yang berisi :

“Jika Presiden Sudan Omar Al-Bashir membiarkan Sudan Selatan yang kaya minyak memisahkan diri secara damai melalui referendum yang akan dilakukan pada Januari 2011, maka pertengahan tahun 2011 Amerika akan menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme”.⁸³

Dengan cara seperti itu Amerika benar – benar menunjukkan diri sebagai sebuah negara super power yang mempunyai pengaruh kuat di dunia internasional, menekan pemerintah pusat Sudan melalui embargo dengan berbagai macam alasan pelanggaran HAM dan pendukung terorisme, menjadi salah satu bukti intervensi Amerika untuk membantu dan mendukung agar Sudan Selatan dapat segera mendirikan negara sendiri dan agar kepentingan Amerika di wilayah tersebut dapat diamankan. Embargo ini pun dilakukan untuk mendukung pihak yang sejalan dengan politik luar negeri Amerika tanpa memperlihatkan alasan yang sebenarnya yaitu memecah belah Sudan menjadi negara – negara kecil yang lemah dan mudah untuk dipengaruhi yang kemudian dapat diraup kekayaan alam yang dimiliki. Hal ini membuktikan bahwa Amerika akan memberikan bantuan

⁸³. Amerika dan Israel Otak di Balik Pecahnya Republik Sudan, <http://ilbambudigospati.wordpress.com/2011/04/28/amerika-dan-israel-otak-di-balik-pecahnya>

serta memberikan dukungan apapun untuk objek yang akan dibantu selama objek tersebut sejalan dan dapat mendukung kepentingan nasionalnya.

D. Bantuan Amerika Serikat Dalam CPA dan Pelaksanaan Referendum.

Setelah Amerika terus mendesak pemerintah pusat Sudan melalui berbagai macam desakan untuk segera melepaskan wilayah Selatan melalui referendum. Referendum pemisahan untuk mendapatkan hak – haknya dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah Selatan ini pun akhirnya dilaksanakan pada 9 Januari 2011 yang lalu. Dalam pelaksanaan referendum pemisahan diri antara Sudan Utara dan Sudan Selatan ini pun tidak terlepas dari bantuan – bantuan pihak asing yang mempunyai kepentingan – kepentingan di wilayah ini. Sebelum referendum terjadi, sejumlah pengamat politik meyakini bahwa penandatanganan nota kesepakatan perdamaian antara SPLM/A dan pemerintah pusat yang menghasilkan poin tentang referendum ini tidak terlepas dari campur tangan pihak – pihak yang mempunyai kepentingan, terutama Amerika Serikat terus berusaha untuk menekan pemerintah Sudan. perjanjian Naivasha atau yang disebut juga sebagai CPA (*The Comprehensive Peace Agreement*) tahun 2005, adalah akhir dari perjanjian - perjanjian fatal sebelumnya yang merugikan bagi pihak pemerintah pusat Sudan dimana dalam perjanjian tersebut disebutkan poin tentang pelaksanaan referendum untuk melihat apakah masyarakat selatan ingin tetap bersatu atau ingin merdeka menjadi sebuah negara baru.

Dalam berjalannya perjanjian – perjanjian sebelumnya pihak Amerika banyak bermain untuk merealisasikan perdamaian di wilayah yang mempunyai

sejarah perang bersaudara terpanjang tersebut. Dimana pada masa pemerintahannya, Bush mengirim utusan khususnya, John Danforth sebagai ketua dalam perundingan awal dan mendorong para pihak agar segera menyelesaikan kesepakatan serta memulai proses perdamaian antara kedua pihak. Mantan Menteri Luar Negeri Colin Powell juga sering terlibat aktif dalam proses perdamaian dan bahkan hingga ke Kenya untuk mendorong para pihak berdamai. Selain itu melalui Dewan Keamanan PBB, pada 19 November 2004, pemerintah Sudan dan SPLA menandatangani deklarasi komitmen mereka untuk melangsungkan perundingan final mengenai Kesepakatan Perdamaian Menyeluruh (*Comprehensive Peace Agreement - CPA*) yang mulai 31 Desember 2004 dimana dalam CPA tersebut terdapat poin yang menyatakan akan diadakannya referendum untuk menentukan apakah wilayah selatan dan utara akan menjadi satu negara atau berpisah menjadi negara yang berbeda setelah 6 tahun upaya integrasi dibawah pengawasan. Perundingan itu akan dilakukan sebagai sesi yang terpisah dari *United Nations Security Council (UNSC)* di Nairobi, Kenya. Dimana sejak UNSC berdiri, perundingan yang dilakukan di luar New York baru 5 kali terjadi. Ini merupakan suatu bentuk tekanan bahwa CPA harus sukses. Sekaligus untuk kemudian direspon sebagai mandat internasional melalui resolusi DK PBB.⁸⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Amerika akan menggunakan segala cara dan sarana untuk dapat memisahkan kedua wilayah tersebut, sarana tersebut juga dapat berupa organisasi internasional seperti PBB tersebut. Dimana kita ketahui bahwa Amerika adalah penyumbang terbesar bagi

⁸⁴. Background Note: Sudan <http://www.state.gov/r/pa/ai/hgn/5424.htm>, diakses pada tanggal 13

organisasi tersebut, maka tidak menutup kemungkinan Amerika dapat lebih banyak bermain dalam keputusan – keputusan yang dikeluarkan oleh PBB, khususnya di wilayah Sudan ini.

Selain dalam penerapan CPA, Amerika juga memperlihatkan dukungannya dalam persiapan untuk referendum. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan kehadiran diplomatik Amerika di Sudan, disaat perhatian internasional terpecah ke konflik di wilayah Darfur. Pada 2010, dimana pada tahun itu adalah akhir untuk perjanjian penerapan CPA dan segera memulai pelaksanaan referendum serta adanya ketakutan akan kegagalan terjadinya referendum yang dapat memicu kembalinya konflik di kedua belah pihak. Amerika kembali mengirim diplomat veteran dan ahli dalam isu Afrika, Princeton Lyman telah dikirim ke daerah untuk memimpin upaya AS bernegosiasi untuk meningkatkan dan melengkapi upaya kedutaan Amerika Serikat di Khartoum dan Konsulat Jenderal Amerika Serikat di Juba.⁸⁵ Hal ini dilakukan oleh Amerika sebagai misi diplomatik untuk membantu Sudan dalam melengkapi dan mengurangi kesalahan pada elemen-elemen terakhir dari pelaksanaan CPA antara selatan dan Utara agar referendum tersebut nantinya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan yang diinginkan.

Selain itu Amerika Serikat terus berusaha untuk memainkan pengaruhnya dalam mengupayakan pemisahan antara wilayah Utara dan Selatan Sudan melalui aktor – aktornya. George Clooney adalah salah satu aktor di luar organisasi pemerintah atau organisasi internasional yang digunakan oleh Amerika Serikat

⁸⁵. Issue Brief, The Sudan Referenda: What Role for International Actors?, IPI (Internasional Peace Institute), November 2010, hal 7.

untuk mendampingi *Google* dan PBB dalam memantau kondisi di Sudan sebelum dan pada saat menjelang referendum terjadi. Sebelumnya PBB sebagai lembaga internasional telah mendirikan sebuah organisasi bernama UNAMIS pada 2005 yang bertugas antara lain untuk mendukung dan memantau kelancaran penerapan perjanjian perdamaian antara kedua belah pihak pada masa – masa transisi sebelum dilaksanakannya referendum dan melakukan dan pada saat menjelang referendum. Membantu pemulangan para pengungsi, menyalurkan bantuan kemanusiaan, untuk membantu para pihak di sektor ranjau, untuk memberikan kontribusi terhadap upaya internasional untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia di Sudan. Organisasi tersebut juga membantu persiapan menjelang pemisahan diri Selatan dengan mengirimkan perlengkapan untuk lebih dari empat juta pemilih di Sudan bagian Selatan.⁸⁶

Sedangkan Organisasi "*Not On Our Watch*" yang didirikan oleh aktor George Clooney yang mengatakan telah bekerjasama dengan Google, berusaha untuk mengawasi keadaan Sudan melalui satelit guna memantau kemungkinan terjadinya kejahatan atau serangan – serangan sebelum dilaksanakannya referendum yang kemungkinan akan membagi dua negara. Program yang digarap Clooney bernamakan *Satellite Sentinel Project*, berfungsi memberikan peringatan dini terjadinya kekerasan menjelang referendum di Sudan pada tanggal 9 Januari 2011 yang lalu.⁸⁷ Dan dengan adanya pemantauan dan usaha – usaha tersebut

^{86.} UNMIS United Nations Mission in the Sudan, <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unmis/background.shtml>, diakses pada tanggal 13 Maret 2012.

^{87.} Referendum di Sudan Bisa Picu Perpecahan, <http://www.forumkaadilan.com/internasional.php?tid=30>, diakses pada tanggal 7 Maret 2012

dapat dipastikan tindakan – tindakan yang dapat mengganggu kelancaran referendum untuk masa depan kedua wilayah tersebut bisa dicegah. Walaupun tidak secara langsung tetapi hanya melalui aktor – aktor yang menjadi alat atau sarana pencapaian politik luar negerinya ini, Amerika Serikat menunjukkan dirinya benar – benar memberikan perhatian dan dukungan yang besar atas referendum pemisahan diri Sudan Selatan. Dan juga dengan begitu, Amerika membuktikan kalau mereka memiliki pengaruh dan andil yang lumayan besar dalam terdinya pemisahan Sudan Utara dan Sudan Selatan sebagai dua negara